

KOORDINASI RELASIONAL GERAJ BERDESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI JAWA BARAT

Nugi Ganjar Nugraha Sobarna
(248010038) ¹

**¹Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Pasundan
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia**

ABSTRACT

This study aims to qualitatively describe the relational coordination of Village Development Services is named "Gerai Berdesa" under the Community and Village Empowerment Official of West Java Province (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD) in the context of accelerating village development—an initiative that has measurably succeeded in reducing the number of underdeveloped villages and increasing the number of independent villages in West Java. A descriptive qualitative research method was employed, focusing on Pangauban Village in Cisurupan District, Garut Regency—an independent villages that achieved first place in the 2025 West Java Province Awards is named "Anugerah Gapura Sri Baduga". Serving functions of consultation, facilitation, and knowledge repository within the Village Development Movement (Gerbang Desa), "Gerai Berdesa" has effectively executed its coordination role—both vertically and horizontally—across central, provincial, and regency/city governments down to the village level, as well as with higher education institutions; in doing so, it acts as a bridge and a catalyst for accelerating village development and community empowerment in West Java. The coordination role of "Gerai Berdesa" has evolved beyond a merely mechanistic function into a more humanistic approach, fostering Relational Coordination. This approach is underpinned by the Relationship dimension—comprising shared goals, shared knowledge, and mutual respect—and the Communication dimension—comprising frequency, timely, and problem-solving. Relational Coordination fosters high-quality coordination processes built upon holistic organizational or institutional relationships (Gittel, 2003). Consequently, Gerai Berdesa's humanistic and relational coordination role significantly supports the success of the Village Development Movement in accelerating village development and community empowerment in West Java, making the sustainability of this initiative essential.

Keywords : Gerai Berdesa, Gerbang Desa, Relational Coordination, Relationship, Communication

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara kualitatif tentang koordinasi relasional "Gerai Berdesa" pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan percepatan pembangunan desa, yang secara terukur telah memberikan dampak berhasil dalam penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif dengan lokus penelitian pada Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, sebagai sebuah Desa Mandiri yang telah meraih predikat "Pinunjul Ke-1" Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Gerai Berdesa dengan fungsi konsultasi, fasilitasi, dan repository pengetahuan dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) telah menjalankan peran koordinasinya baik secara vertikal dan horizontal dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa, dengan perguruan tinggi sehingga menjadi jembatan dan proses percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat. Peran koordinasi Gerai Berdesa bukan lagi bersifat mekanistik belaka

tetapi ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih humanis, mewujudkan proses koordinasi yang bersifat relational (*Relational Coordination*) yang ditopang oleh dimensi *Relationship*, dengan 3 (tiga) aspeknya, yaitu *Shared Goals, Shared Knowledge, Mutual Respect* dan dimensi *Communication*, dengan 3 (tiga) aspek, yaitu: *Frequent, Timely, Problem-Solving*. Bahwa *Relational Coordination* menghasilkan proses koordinasi dengan kualitas berderajat tinggi yang terbangun dalam hubungan pada tatanan organisasi atau kelembagaan secara holistik (Gittel, 2003), Karena itu, Gerai Berdesa yang menjalankan peran koordinasi dengan lebih humanis dan relasional sangat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa guna percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya.

Kata kunci : Gerai Berdesa, Gerbang Desa, Relational Coordination, Relationship, Communication

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: 1) pemenuhan kebutuhan dasar, 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa, 3) pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta ayat (3) Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Desa di setiap daerah membutuhkan fungsi koordinasi yang baik mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dengan melibatkan lintas pemerintahan dan lintas sektor dan stakeholder.

Namun secara faktual dan umumnya dalam organisasi atau lembaga pemerintahan ditemukan pandangan bahwa “koordinasi mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan”. Bahasa yang memperhalus gambaran tersebut adalah koordinasi di lingkungan pemerintahan daerah belum berjalan secara optimal. Walaupun pada lingkungan pemerintahan daerah fungsi koordinasi merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Fungsi koordinasi memiliki peran penting dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi, karena koordinasi dimaknai sebagai upaya untuk menyelaraskan kinerja seluruh unit di dalam organisasi agar dapat berjalan pada arah yang sama, yaitu pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, koordinasi di lingkungan pemerintahan daerah masih banyak menghadapi berbagai kendala dan hambatan, sehingga fungsi organisasi pemerintahan daerah dinilai masih belum dapat berjalan secara efektif. Permasalahan koordinasi di lingkungan pemerintahan daerah dipandang menjadi sebuah masalah klasik yang senantiasa menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja organisasi pemerintah daerah secara akuntabel.

Hambatan dalam koordinasi menjadi penyebab kurang optimalnya kualitas capaian dari tujuan organisasi pemerintah daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan beberapa faktor yang menjadi penghambat dari belum optimalnya koordinasi di lingkungan pemerintahan daerah secara umum dapat disebabkan beberapa faktor, seperti: 1) Masih tingginya ego sektoral, 2) persepsi hirarki atau tingkatan masih dominan di dalam interaksi pelaksanaan tugas dan fungsi, 3) Rendahnya kualitas komunikasi di antara jejaring hubungan kerja, bahkan di dalam beberapa kasus hambatan koordinasi disebabkan oleh faktor yang lebih bersifat personal, seperti karena ketidaksukaan dan ketidaknyamanan untuk melakukan interaksi secara individual.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat atau DPMD Jabar, sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi, memiliki tujuan strategis organisasi yaitu : meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan sasaran strategis organisasi yaitu : mempercepat pembangunan desa melalui percepatan pengentasan desa tertinggal dan percepatan pencapaian kemandirian desa. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMD Jabar, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang mencakup, yaitu : 1) Sub-urusan Penataan Desa, 2) Sub-urusan Kerjasama Desa dan 3) Sub-urusan Lembaga Kemasyarakatan Adat/ Hukum Adat.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPMD Jabar menyelenggarakan program unggulan Gerakan Membangun Desa atau Gerbang Desa, dengan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerbang Desa. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 Tahun 2022, telah ditetapkan 12 (dua belas) prioritas kegiatan penyelenggaraan Gerbang Desa, dan pada tahun 2023 dikembangkan menjadi 15 (lima belas) prioritas kegiatan, berdasarkan kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2023. Guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan program unggulan Gerbang Desa tersebut, maka 15 (limabelas) prioritas kegiatan unggulan Gerbang Desa harus dikoordinasikan satu dengan yang lainnya, dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah Provinsi, antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Koordinasi antar Pemerintah Provinsi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi DKI Jaya untuk membangun desa-desa khususnya yang tertinggal dan/atau berkembang pada wilayah-wilayah perbatasan

khususnya “daerah 3T” (Tertinggal, Termiskin dan Terluar). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan difasilitasi Bappeda Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jaya setiap tahunnya, dengan menghasilkan dokumen kesepakatan kerjasama antara pemerintah provinsi. Koordinasi program unggulan Gerbang Desa dilakukan oleh Tim Koordinasi Gerbang Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya, DPMD Jabar sebagai sebagai pengampu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam rangka mendukung penyelenggaraa program unggulan Gerbang Desa, maka melakukan inisiatif mengembangkan satu unit layanan publik guna percepatan atau akselerasi layanan pembangunan desa berupa Unit Layanan Gerai Berdesa DPMD Jabar, berdasarkan Keputusan Kepala DPMD Jabar No. Kep.068/PMD.01-BINDES/2022 Tentang Satgas Layanan Gerai Berdesa.

Tugas Pokok Satgas Layanan Gerai Berdesa adalah memberikan layanan konsultasi, layanan fasilitasi dan layanan data/informasi/pengetahuan dalam wujud *repository* berbasis digital untuk pemberian rekomendasi dan solusi dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas stakeholders pembangunan desa di Jawa Barat. Gerai Berdesa pada DPMD Jabar dibentuk dengan pendekatan inovatif yang berorientasi pada terwujudnya SMART (*Spesific, Measurable, Achieveable, Rational, Timebouding*) dan solusi terintegrasi berbasis digital guna layanan pendampingan Desa untuk percepatan pembangunan desa-desa di wilayah Propinsi Jawa Barat, berbasis pada fungsi layanan konsultasi, layanan fasilitasi dan layanan *repository* kepada desa berbasis digital.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pencapaian kinerja yang dinilai luar biasa dalam rangka percepatan pembangunan desa melalui program unggulan Gerbang Desa. Program unggulan Gerbang Desa telah menghasilkan pencapaian kinerja percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja pembangunan desa dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), sebagai ukuran kemajuan strata desa, yang mencakup desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri, Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja pembangunan desa yang dapat dibanggakan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 kondisi strata desa-desa memiliki komposisi yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana dari 5311 desa – desa di Jawa Barat memilikia komposisi sebagai berikut : 0 (zero) Desa Sangat Tertinggal (0 %), 0 (zero) Desa Tertinggal

(0 %), 930 Desa Berkembang (17,51 %), 2.553 Desa Maju (48.07 %) dan 1.828 Desa Mandiri (34.42 %), dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Jawa Barat sebesar 0.77 poin yang telah melampaui target dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 0.72 poin.

Berdasarkan uraian di atas, dan memperhatikan peran dan fungsi dari Gerai Berdesa dalam mendukung percepatan pembangunan desa sampai dengan tahun 2024 melalui konsultasi dan fasilitasi percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, dan memperhatikan fenomena terjadinya percepatan pencapaian kinerja pembangunan desa-desa di Jawa Barat sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penelitian ini melakukan kajian dan analisis tentang fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Gerai Berdesa, yaitu tentang bagaimana gambaran koordinasi relasional yang dilakukan oleh Gerai Desa antar lintas Perangkat Daerah dan lintas pemerintahan yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintahan desa serta dengan Perguruan Tinggi, guna mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui konsultasi dan fasilitasi pembangunan desa sesuai dengan peran dan fungsi Gerai Berdesa.

Proses kajian dan analisis dalam penelitian ini dilakukan pada lingkungan Gerai Berdesa dan DPMD Jabar melalui berbagai data dan informasi yang langsung digali dan didalami dari Unit Layanan Gerai Berdesa dan Bidang-Bidang pada DPMD Jabar. Selanjutnya, kajian dan analisis juga dilakukan pada lingkungan eksternal DPMD Jabar melalui berbagai data dan informasi yang langsung digali dan didalami melalui observasi dan wawancara dengan melibatkan Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kotat, serta Perguruan Tinggi sebagai informan, dimana aktivitas koordinasi relasional Gerai Berdesa selamam ini telah dilaksanakan. Dengan hasil penggalian dan pendalaman data dan informasi melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di atas, melalui analisis koordinasi relasional Gerai Berdesa dalam melakukan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, maka hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi dan kemanfaatan kepada berbagai pihak baik secara akademik dan praktis.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pelaksanaan koordinasi relasional antara Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Garut, Camat Cisurupan, dan Pemerintah Desa Pangauban di Kabupaten Garut. serta IPDN dari unsur Perguruan Tinggi yang dijembatani oleh Gerai Berdesa. Desa Pangauban dipilih sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa Desa Pangauban telah melalui pembinaan DPMD Jabar melalui Gerai Berdesa sehingga saat ini telah memiliki strata Desa Mandiri (strata tertinggi), dan sebagai Desa Pemenang Pertama (Desa Pinunjul Kahiji) Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025.

Secara substansi, dalam penelitian ini penelitian difokuskan pada beberapa aspek yang menjadi tugas fungsi Gerai Berdesa pada DPMD Jabar, yaitu : 1) Pelaksanaan Gerai Berdesa melakukan koordinasi relasional dengan pihak OPD Provinsi dalam memfasilitasi kebutuhan penyelesaian permasalahan desa, 2) Pelaksanaan Gerai Berdesa melakukan koordinasi relasional dengan pihak Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam memfasilitasi kebutuhan penyelesaian permasalahan desa, 3) Pelaksanaan Gerai Berdesa melakukan koordinasi relasional dengan pihak Perguruan Tinggi dalam memfasilitasi kebutuhan penyelesaian permasalahan desa. Pelaksanaan koordinasi relasional Gerai Berdesa dengan berbagai pihak tersebut memberikan dampak pencapaian kinerja DPMD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang dinilai luar biasa, dalam rangka percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat melalui program unggulan Gerbang Desa.

KAJIAN TEORI

1. Penelitian Terdahulu Tentang Koordinasi

Beberapa penelitian terdahulu yang dikaji untuk dijadikan pertimbangan dan rujukan sebagai landasan teori atau konsep dalam penelitian antara lain : Pertama, Marbun, dkk (2013) : melakukan penelitian tentang Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir. Penelitian ini menggunakan Teori Koordinasi yang dikemukakan oleh Malone dan Crowstone (1990), Handyaningrat (1992), Hasibuan (2003). Hasil penelitian yang diperoleh BPBD Kota Medan belum melakukan koordinasi sesuai dengan tupoksi karena persoalan komunikasi yang belum optimal antar instansi dan mengingat kembali prinsip-prinsip koordinasi agar dapat berjalan dengan baik dan sistematis, sangat diperlukan komunikasi yang baik dan sistematis.

Kedua, Morlian (2016) : melakukan penelitian tentang Peranan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai, dengan lokus di Dinas PU Provinsi DKI Jaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pandangan teori Chung dan Megginson (1981), Sutisna (1989), Hasibuan (2006) dan Handoko (2009). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa koordinasi efektif terjadi di tingkat pegawai dalam suasana informal, dan sebaliknya koordinasi antara atasan (pimpinan) dengan bawahan berlangsung kurang efektif yang disebabkan kurang konsistennya pimpinan dalam menjalankan program-program kerja.

Ketiga, Zuhri, dkk (2017) : melakukan penelitian tentang Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan, dengan lokus di 6 (enam) desa di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, yaitu: Desa Kemloko, Desa Penataran, Kelurahan

Nglegok, Desa Bangsri, Desa Jiwut, dan Desa Krenceng. Penelitian ini berbasis pada : 1) Teori Stakeholders : Scheemer (2000), Hertifah (2003), Iqbal (2007), Nugroho (2014); 2) Teori Peran : Soekanto (2002); dan 3) Teori Koordinasi : Moekijat (1994), dengan menggunakan sumber data berupa data-data primer dan sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa keberhasilan operasionalisasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sangat dipengaruhi oleh peran dan koordinasi para pemangku kepentingan atau stakeholder baik sebagai subject atau object dari kebijakan minapolitan.

Keempat, Mastina dan Mitra (2023) : melakukan penelitian tentang Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, dengan lokus penelitian pada 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Penelitian ini berbasis pada konsep 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam aksi konvergensi stunting belum optimal, karena belum ada regulasi yang memperkuat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi di masing-masing kabupaten.

2. Grand Theory, Middle Theory dan Operasional Theory Tentang Koordinasi

Grand Theory (Teori Besar) dari Teori Koordinasi umumnya berakar pada Teori Manajemen Klasik (*Classical Management Theory*), yang dikembangkan oleh tokoh seperti Henri Fayol. Henri Fayol, salah satu pencetus teori manajemen klasik, menekankan bahwa koordinasi adalah bagian dari fungsi pengelolaan untuk menyatukan kegiatan yang berbeda guna mencapai tujuan bersama. Menurut teori manajemen klasik, fokus dari koordinasi adalah guna menyelaraskan seluruh unit kerja agar tidak berjalan sendiri-sendiri, mengurangi konflik, dan mengintegrasikan aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Middle Range Theory (Teori Tingkat Menengah) dari Teori koordinasi, terutama dalam studi manajemen dan organisasi keperawatan terkait dengan teori yang menjembatani kesenjangan antara *grand theory* yang abstrak dengan praktik manajemen dan organisasi yang konkret. Dalam konteks middle teori, beberapa teori yang sering digunakan untuk mengatur koordinasi dalam praktik empiris manajemen dan organisasi keperawatan, antara lain: 1) Teori Transisi (Meleis), yaitu mengkoordinasikan asuhan pasien yang sedang berpindah dari satu kondisi kesehatan/lingkungan ke lainnya; 2) Teori Pencapaian Tujuan, yaitu

mengkoordinasikan tindakan perawat dan pasien untuk mencapai tujuan kesehatan bersama, 3) Teori Manajemen Penyakit Kronis, yaitu fokus pada koordinasi jangka panjang untuk pasien dengan penyakit kronis

Operasional Theory (Teori Tingkat Operasional) memahami koordinasi merupakan bagian integral dari kepemimpinan di dalam organisasi. Sejalan dengan itu, Herujito (2006) mengemukakan bahwa koordinasi merupakan satu prinsip penting di dalam organisasi yang tidak bisa diabaikan, dan menjadi asas pertama dalam pencapaian tujuan organisasi, sedangkan asas-asas lain adalah sub-ordinat yang memungkinkan koordinasi dapat berjalan dengan efektif. Koordinasi dipahami sebagai bagian integral dari kepemimpinan juga ditegaskan dalam pengertian yang disampaikan oleh Hasibuan (2014) bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, Hasibuan (2014) mengemukakan bahwa sosok manajer yang sukses adalah manajer yang mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan baik. Merujuk kepada beberapa pengertian dari koordinasi bahwa koordinasi dapat dipahami sebagai pengelolaan hubungan di antara beberapa aktivitas dari unit-unit di dalam organisasi, sehingga kata kunci dari koordinasi adalah adanya hubungan atau ketergantungan dari aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang/pihak. Hal tersebut sejalan dengan pengertian koordinasi menurut Malone dan Crowston (1994) bahwa pengertian dari koordinasi adalah: *“Managing dependencies between activities.”* Keduanya memberikan analisa bahwa aktivitas dari organisasi merupakan refleksi dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama.

Untuk dapat memahami koordinasi secara lebih spesifik adalah dengan penekanan karakter khusus yang menjadi penci dari koordinasi dalam definisi umum, yaitu makna harmonis yang mengimplikasikan tentang hubungan di antara beberapa aktivitas, sehingga Malone dan Crowston (1990) memberikan definisi koordinasi dalam arti sempit sebagai: *“The Act of Managing interdependencies between activities performed to achieve a goal.”*

Pemahaman koordinasi baik secara umum dan khusus, pada hakikatnya menekankan bahwa koordinasi dibutuhkan ketika terdapat hubungan di antara beberapa aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, dan jika tidak maka koordinasi tidak dibutuhkan. Jenis dari hubungan antara unit-unit di dalam organisasi atau di antara beberapa aktivitas, selanjutnya menjadi dasar bentuk proses koordinasi yang dibutuhkan agar dapat terjadi

keselarasan dan keharmonisan, sehingga akan mampu berkontribusi secara maksimum dalam mewujudkan tujuan kolektif.

3. *Relational Coordination Theory* (Pengembangan Teori Koordinasi)

Salah satu teori yang dikembangkan dari teori koordinasi adalah *Relational Coordination Theory*. Secara umum, teori ini merupakan transformasi pendekatan koordinasi dari yang bersifat mekanis menjadi pendekatan yang humanis, yaitu koordinasi yang dibangun di atas hubungan yang berkualitas di antara para pelaku aktivitas, yang didukung dengan kualitas komunikasi berderajat tinggi. Gittel (2003) mengemukakan: “*Relational coordination is coordination carried out through relationship of shared goals, shared knowledge, dan mutual respect, joint with frequent, timely, problem-solving communication to form a powerful force.*” Berdasarkan definisi tersebut, bahwa organisasi merupakan kelompok yang terdiri dari manusia, sehingga pendekatan koordinasi untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi harus berdasarkan pada pendekatan humanis, yaitu koordinasi organisasi yang dibangun di atas hubungan personal yang berkualitas di antara seluruh individu sebagai pelaku dari aktivitas, tidak hanya terbatas pada hubungan dari aktivitas yang dilakukan.

Selanjutnya, Gittell (2011) mengemukakan bahwa secara historis, dasar gagasan dari *Relational Coordination Theory* pertama kali dikemukakan oleh Mary Parker Follett, yang berpendapat bahwa efektivitas dari koordinasi sebagai fungsi utama dari organisasi akan dapat diwujudkan secara efektif melalui proses hubungan yang berkelanjutan antara individu sebagai bagian dari kelompok, dibandingkan dengan koordinasi yang didasarkan pada proses mekanisme. Koordinasi yang dibangun di atas hubungan yang kuat dan berkualitas di antara seluruh individu di dalam organisasi akan menjadi faktor pengungkit lahirnya keunggulan kompetitif, sebagai modal berharga bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa satu bukti keunggulan kompetitif yang terbangun melalui koordinasi yang didasarkan pada hubungan yang kuat dan berkualitas di antara individu di dalam organisasi adalah kemampuan untuk menerobos kalkulasi yang selama ini menjadi persepsi umum, yaitu melakukan efisiensi cenderung memiliki konsekuensi terhadap penurunan kualitas output yang dihasilkan. Karena itu, efektivitas koordinasi di dalam organisasi sebagai kumpulan yang terdiri dari sejumlah manusia, membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dalam melakukan pengaturan hubungan dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu di dalam organisasi. Dalam kaitan tersebut, Gittell (2011)

mengemukakan: “*Relational coordination theory makes visible the humanistic process underlying the technical process of coordination, arguing that coordination encompasses not only the management of interdependence between tasks but also between the people who perform those tasks*”

Gittel mengatakan bahwa *Relational Coordination Theory* merupakan koordinasi dengan kualitas berderajat tinggi yang terbangun dalam hubungan pada tatanan organisasi secara holistik yang berlandaskan pada dua dimensi, yaitu : 1) *Relationship*, yang digambarkan dengan tiga aspek, yaitu *Shared Goals; Shared Knowledge; Mutual Respect*; dan 2) *Communication*, yang digambarkan dengan tiga aspek, yaitu: *Frequent; Timely; Problem-solving* (Gittel, 2003). Teori Koordinasi Relasional (*Relational Coordination Theory*) yang dikembangkan oleh Gittel berfokus pada bagaimana hubungan antar manusia (tujuan bersama, pengetahuan bersama, dan saling menghormati) serta komunikasi (sering, tepat waktu, akurat, pemecahan masalah) dalam mengoordinasikan pekerjaan yang saling bergantung satu sama lain.

METODOLOGI

1. Kerangka Pikir dan Proposisi

Penelitian ini berbasis pada teori koordinasi secara umum, dan lebih khusus pada *Relational Coordination Theory* yang disampaikan Gittel (2003) guna membangun model pendekatan koordinasi relasi dalam pembangunan desa, yang merupakan teori koordinasi dengan kualitas berderajat tinggi yang terbangun dalam hubungan pada tatanan organisasi secara holistik yang berlandaskan pada dua dimensi, yaitu : 1) Dimensi *Relationship*, yang digambarkan dengan tiga aspek, yaitu : *shared goals, shared knowledge, dan mutual respect*; dan 2) Dimensi *Communication*, yang dengan tiga aspek, yaitu: *frequent; timely; problem-solving*.

Pertama, Dimensi *Relationship*, yaitu kualitas hubungan yang terbangun di antara para pelaku di dalam pelaksanaan koordinasi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, yang akan dikaji dan dianalisa melalui melalui tiga aspek, yaitu :

- 1) *Shared Goals*, atau kesamaan persepsi terhadap tujuan, yang digambarkan dengan pemahaman bahwa setiap individu mengetahui tujuan utama dari organisasi, dan tujuan dari aktivitas yang dilakukannya pada unit dari organisasi, serta bagaimana hubungan dari aktivitas unit terhadap tujuan utama organisasi.

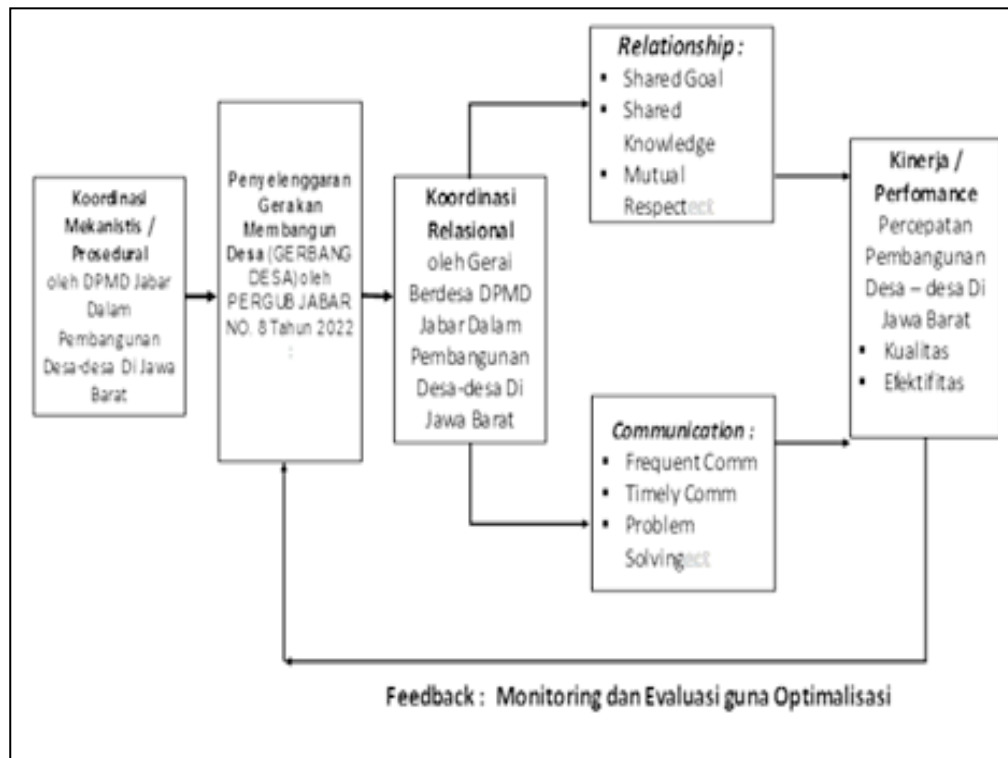
- 2) *Shared Knowledge*, yaitu setiap orang di dalam organisasi mengetahui dan memahami tentang keseluruhan rangkaian proses aktivitas yang dilakukan oleh setiap unit di dalam organisasi sampai dengan produk akhir yang dihasilkan, serta mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu pada seluruh unit, serta bagaimana hubungan di antara aktivitas-aktivitas tersebut.
- 3) *Mutual Respect*, yaitu setiap individu di dalam organisasi menghargai dan memberikan respek terhadap individu yang lain, baik secara personal maupun terhadap aktivitas yang menjadi tugasnya masing-masing, serta tidak ada seorangpun yang merasa paling penting di dalam organisasi.

Kedua, Dimensi *Communication* atau komunikasi, yang dikaji dan dianalisa melalui tiga aspek, yaitu:

- 1) *Frequency*, yaitu frekuensi komunikasi yang dilakukan oleh tiap individu dengan individu lain di dalam organisasi dalam membangun hubungan serta meningkatkan kualitas koordinasi dalam menjalankan aktivitas masing-masing menuju pencapaian tujuan bersama.
- 2) *Timely*, kontinuitas atau kesinambungan komunikasi antarindividu di dalam organisasi seputar aktivitas yang mereka terlibat di dalamnya sehingga melahirkan informasi yang akurat bagi setiap orang yang terlibat dalam aktivitas.
- 3) *Problem-Solving*, yaitu pendekatan penyelesaian masalah yang didahulukan daripada mencari siapa yang salah.

Setelah mengkaji aspek-aspek dan dimensi-dimensi dari koordinasi, kemudian dikaji pula *Performance Impact*, yang meliputi *Quality Outcomes* dan *Efficiency Outcomes*. Selanjutnya, dengan mengkaji aspek-aspek dari koordinasi berikut dengan kinerja diharapkan dapat teridentifikasi kendala-kendala dalam koordinasi, untuk kemudian dapat ditemukan upaya-upaya sebagai umpan balik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konteks penelitian ini, digunakan kerangka penelitian model Gittel (2003) yang telah dimodifikasi peneliti dengan melibatkan fungsi *Relational Coordination* sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Model Gittel (2003), dimodifikasi Peneliti (2026)

Berdasarkan kerangka penelitian sebagaimana ditunjukkan Gambar 1, maka proposisi penelitian ini dinyatakan sebagai berikut : bahwa pendekatan koordinasi relasi yang dilakukan oleh Gerai Berdesa DPMD Jawa Barat melalui peningkatan kualitas relasi atau hubungan dan peningkatan kualitas komunikasi yang lebih humanistik dengan berbagai pihak terkait akan mampu meningkatkan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat dalam aspek kualitas dan efektivitas

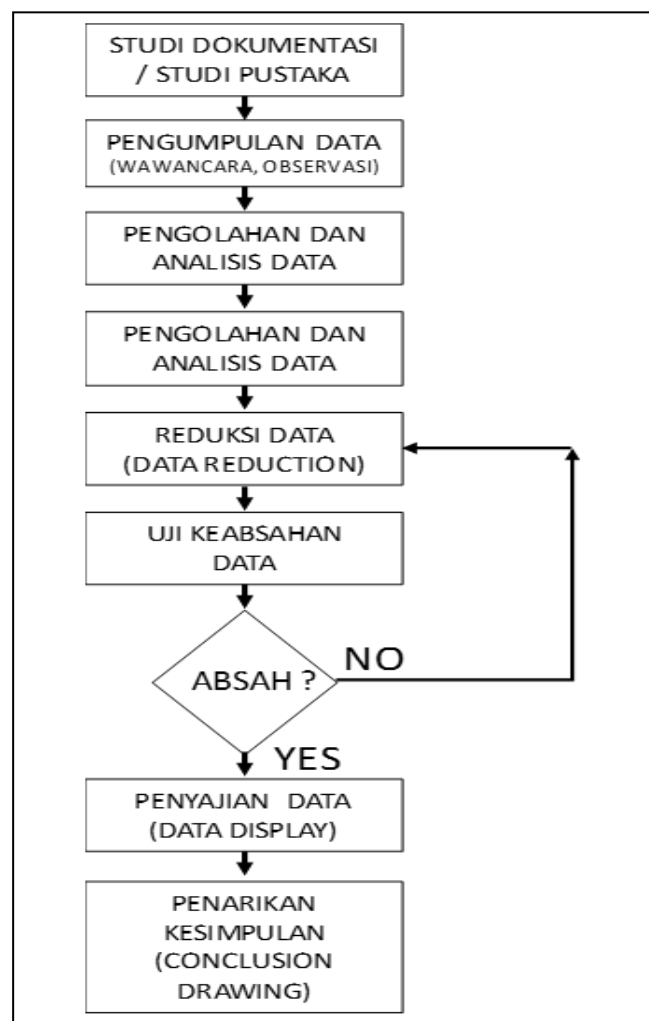
2. Metode dan Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni suatu upaya untuk lebih mengenal atau memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang berangkat dari faktor-faktor empirik dalam rangka menemukan kebenaran. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini menggali lebih dalam fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula dan lain sebagainya, selanjutnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

menekankan pada hal yang terpenting dari sifat dari sesuatu sebagai gejala sosial untuk menggali makna dibaliknya (Satori dan Komariah, 2013).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan induktif, maksudnya penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif (Moleong, 2007) Sedangkan menurut Asyari (1983) pendekatan induktif adalah : “Memberikan cara agar manusia dapat memecahkan suatu problematika, dengan mencari fakta-fakta yang nyata, dan dari fakta-fakta itu ditarik kesimpulan”.

Prosedur tahapan peneltian sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 1, sebagai berikut :



Gambar 2. Prosedur dan Tahapan Penelitian

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi, partisipan penelitian atau informan dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan untuk membantu peneliti memahami masalah yang diteliti (Creswell, 2010). Oleh karena itu, prosedur pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* (penentuan informan berdasarkan tujuan), sehingga diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut, serta berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian, maka dilakukan wawancara terhadap informan-informan utama sebagaimana yang tersaji dalam Tabel.1 sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Data/Informasi yang Ingin Didapatkan
1.	Kepala Bidang Bina Desa – DPMD Jabar	1. Kebijakan Program Unggulan Gerbang Desa di Jawa Barat, 2. Kebijakan Gerai Berdesa dalam rangka Gerbang Desa.
2.	Koordinator Gerai Berdesa	1. Program dan Kegiatan Gerai Berdesa, 2. Penganggaran Gerai Berdesa.
3.	Sekretaris Umum Gerai Berdesa	3. Tata Kelola atau Manajemen Gerai Berdesa. 4. Fungsi Koordinasi Gerai Berdesa .
4.	Kepala Desa	1. Pelaksanaan fungsi koordinasi Gerai Berdesa dengan Pemerintah Desa. 2. Manfaat Gerai Berdesa bagi Pemerintahan Desa.
5.	Camat	1. Pelaksanaan fungsi koordinasi Gerai Berdesa dengan Kecamatan. 2. Manfaat Gerai Berdesa bagi Kecamatan.
6.	Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan fungsi koordinasi Gerai Berdesa dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Manfaat Gerai bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota.
7.	Perguruan Tinggi	Pelaksanaan fungsi koordinasi Gerai Berdesa dengan Perguruan Tinggi dalam Fasilitasi Desa melalui Kerjama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal khusus yang dijelaskan atau digambarkan secara kualitatif dalam penelitian ini adalah pelaksanaan koordinasi relasional Gerai Berdesa DPMD Provinsi Jawa Barat dalam percepatan pembangunan desa di Provinsi Jawa Barat khususnya, dengan pilihan lokus di Desa Pangauban, Kecamatan Cisarupan – Kabupaten Garut.

Sesuai dengan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dari penelitian, maka digambarkan dan dijelaskan secara khusus mengenai dimensi dan aspek yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi relasional Gerai Berdesa dalam percepatan pembangunan desa di Provinsi Jawa Barat, mencakup 2 (dua) dimensi, yaitu: 1) *Dimensi Relationship* dan 2) *Dimensi Communication*.

1. Dimensi Relationship

Pertama, Dimensi *Relationship*, menggambarkan bagaimana kualitas hubungan yang terbangun antara Gerai Berdesa dengan pihak-pihak terkait di dalam pelaksanaan koordinasi relasional dalam rangka Program Gerbang Desa di DPMD Provinsi Jawa Barat dan Program-Program Inovatif di Desa Pangauban, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut dengan analisis tiga aspek, yaitu : 1) *Shared Goals*, 2) *Shared Knowledge* dan 3) *Mutual Respect*.

Aspek *Shared Goals*

Aspek *shared goals* dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa memastikan bahwa semua anggota organisasi yang terkait dengan Gerai Berdesa yang terlibat dalam suatu proses kerja percepatan pembangunan desa di Jawa Barat memiliki pemahaman dan komitmen terhadap tujuan akhir yang sama. Karena itu Gerai Berdesa dalam setiap gerakannya memiliki fokus dalam mengubah mentalitas ego sektoral atau tujuan individu yang menjadi visi kolektif.

Setiap orang atau individu yang terkait Gerai Berdesa harus menyadari prioritas utama dalam proses kerja tersebut. Implikasi dari semua itu, dalam pelaksanaan gerakan Gerai Berdesa dalam percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, apabila terjadi masalah atau hambatan, semua pihak atau individu akan berfokus pada cara menyelesaikan masalah demi kepentingan bersama secara kolektif, dan bukan saling menyalahkan atau mementingkan target masing-masing individu atau unit kerjanya sendiri-sendiri.

Aspek *Shared Knowledge*

Aspek *shared knowledge* dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa merujuk pada pemahaman mendalam yang dimiliki oleh setiap orang atau individu terkait Gerai Berdesa, tentang peran, kompetensi, serta batasan tugas dari setiap rekan atau mitra kerja dari unit kerja atau profesi lainnya yang tergabung dalam Gerai Berdesa. Karena itu, setiap orang atau individu yang terlibat dalam gerakan Gerai Berdesa guna melakukan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat harus memiliki fokus untuk

menghilangkan sekat-sekat antar individu, profesi atau unit kerja yang menjadi penghalang.

Setiap individu, profesi atau unit kerja yang terkait dengan Gerai Berdesa harus paham betul bagaimana kontribusi masing-masing individu, profesi atau unit kerja sangat berkaitan dengan pekerjaan satu dengan yang lainnya. Karena itu, setiap individu, profesi atau unit kerja yang terkait dengan Gerai Berdesa dalam pelaksanaan gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat.

Setiap individu, profesi atau unit kerja tidak hanya berfokus pada pekerjaannya masing-masing, tetapi juga menyadari dampak tindakannya terhadap beban kerja setiap individu, profesi atau unit kerja lainnya. Dengan demikian hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan atau mis-komunikasi antar individu, profesi atau unit kerja, karena mereka semua bersama orang berada dalam "halaman" atau "beranda" yang sama.

Aspek *Mutual Respect*

Aspek mutual respect dalam koordinasi relasioanal Gerai Berdesa mencakup pengakuan dan penghargaan atas nilai, kontribusi, serta keahlian yang dibawa oleh setiap individu, profesi atau unit kerja lainnya di dalam pencapaian keberhasilan atau ketidakberhasilan Gerai Berdesa dalam melakukan gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat. .

Setiap individu, profesi atau unit kerja terkait dengan Gerai Berdesa harus memiliki fokus dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif di mana setiap peran setiap individu, profesi atau unit kerja dianggap penting dan berharga bagi keberhasilan gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat. Karena itu, dalam pelaksanaan gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, setiap individu, profesi atau unit kerja harus saling mendengarkan dan menghargai masukan satu sama lainnya. Sikap tersebut dapat menciptakan rasa aman secara psikologis satu sama lain, sehingga diskusi pemecahan masalah terkait dengan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, Berdesa melalui Gerai bisa berjalan lebih terbuka tanpa adanya rasa takut diremehkan

2. Dimensi *Communication*

Kedua, Dimensi *Communication*, menggambarkan bagaimana kualitas komunikasi yang terbangun di antara Gerai Berdesa dengan pihak-pihak terkait di dalam pelaksanaan koordinasi relasional dalam rangka Program Gerbang Desa di DPMD Provinsi Jawa Barat dan Program-Program Inovatif di Desa Pangauban, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan analisis tiga aspek, yaitu : 1) *Frequency*, 2) *Timely*, dan 3) *Problem Solving*.

Aspek *Frequency*

Aspek *frequency* dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa berkaitan dengan penilaian seberapa sering setiap individu, profesi atau unit kerja yang terkait dalam percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat kerja terus saling berkomunikasi satu sama lain secara berkelanjutan, terkait proses gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat.

Dengan adanya frekuensi yang tinggi dalam membicarakan dan membahas percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, cenderung lebih memastikan bahwa informasi penting terus mengalir antar setiap individu, profesi atau unit kerja dan memperkuat kesadaran situasional di antara masing-masing yang tugasnya saling berkaitan dalam Gerai Berdesa.

Aspek *Timely*

Aspek *timely* (ketepatan waktu) dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa berkaitan dengan pengukuran apakah informasi disampaikan setiap individu, profesi atau unit kerja yang terkait dalam percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, tepat pada waktunya.

Dengan demikian pada saat setiap pihak membutuhkan informasi, lebih dapat dipastikan bahwa informasi yang dibutuhkan tersebut tersedia dengan cepat dan mudah, agar setiap pekerjaan atau aktivitas percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat dapat dieksekusi, tanpa adanya hambatan atau penundaan.

Aspek *Problem Solving*

Aspek *problem solving* (pemecahan masalah) dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa berkaitan dengan penilaian sejauh mana komunikasi setiap individu, profesi atau unit kerja yang terkait dalam percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, hanya memiliki fokus pada hal-hal terkait dengan kolaborasi dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat secara bersama-sama.

Komunikasi antar setiap individu, profesi atau unit kerja dalam Gerai Berdesa hanya berorientasi pada penyelesaian masalah ketika masalah, kendala atau hambatan terjadi, dan bukan bentuk komunikasi untuk saling menyalahkan atau mencari kambing hitam satu sama lain.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- 1) Dimensi *Relationship* dan *Communication* dalam koordinasi relasional Gerai Berdesa dalam percepatan pembangunan-pembangunan desa-desa Di Jawa Barat,

dengan aspek-aspeknya mewujudkan koordinasi antar individu, antar profesi dan antar unit kerja yang lebih humanis, dalam penyelenggaran gerakan membangun desa, dan bukan koordinasi yang sekedar formalistik.

- 2) Dimensi Relationship memujudkan koordinasi relasional Gerai Berdesa antar individu, antar profesi dan antar unit kerja yang lebih humanis, pada 3 (tiga) aspeknya, yaitu :
 - a. *shared goal* : kesadaran dan tindakan untuk memiliki tujuan bersama,
 - b. *shared knowledge* : kesadaran dan tindakan untuk pengetahuan bersama, dan
 - c. *mutual respect* : kesadaran dan tindakan untuk saling menghargai.
- 3) Dimensi Communication memujudkan koordinasi relasional Gerai Berdesa antar individu, antar profesi dan antar unit kerja yang lebih humanis, pada 3 (tiga) aspeknya, yaitu :
 - a. *frequently* : kesadaran dan tindakan untuk melakukan komunikasi lebih tinggi atau lebih sering;
 - b. *timely* : kesadaran dan tindakan untuk melakukan komunikasi dengan cepat dan tepat waktu; dan
 - c. *problem solving* : kesadaran dan tindakan untuk melakukan komunikasi yang berfokus pada penyelesaian masalah dan kendala bersama.

2. Rekomendasi

Saran perbaikan terhadap pelaksanaan koordinasi relasional Gerai Berdesa pada DPMD Provinsi Jawa Barat dalam rangka gerakan percepatan pembangunan desa-desa di Jawa Barat, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas Teknologi Informasi/Digitalisasi Gerai Berdesa guna melakukan koordinasi relasional dengan semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Percepatan Pembangunan Desa-desa di Jawa Barat, dengan Unit *Command Centre Gerai Berdesa* atau *Gerai Berdesa Digital Services*.
- 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Gerai Berdesa dalam yang berorientasi pada kolaborasi dalam problem solving percepatan pembangunan desa/kelurahan di Jawa Barat, melalui peningkatan intensitas kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan Perguruan Tinggi, dengan sasaran desa-desa di Jawa Barat, terutama pada wilayah desa-desa 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) dan desa-desa urban.

PUSTAKA

1. Buku Pustaka

Afifuddin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta

- Creswell, Jhon W., 2009. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles : Sage Publications
- Gittel, Jody Hoper, 2003. *The Southwest Airlines Ways – Using the Power of Relationships to Achieve High Performance*. New York: McGraw-Hill.
- Gittel, Jody Hoper, High Performance Healthcare, *Using the Power of Relationships to Achieve Quality, Efficiency, and Resilience*. New York: McGraw-Hill.
- Handayani, Soewarno, 1995. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2014. *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M, 2006. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta : Grasindo
- Moleong, L.J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosyda Karya
- Myers, Michael D., 2013. *Qualitative Research in Business & Management*. London : Sage Publications
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Press
- Satori, Djam'an, dan Komariah, Aan, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamijoyo, Bintoro, dan Mustopadidjaya, 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, Pengembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta : LP3ES

2. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023)
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa.